DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI DENGAN KOMISI I S.D KOMISI XIII DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2025—2029 DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 11 NOVEMBER 2024

Tahun Sidang	:	2024—2025
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	13
Jenis Rapat	:	Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 12 November 2024
Waktu	:	Pukul 13.34 WIB s.d pukul 14.50 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Mendengarkan Usulan RUU dari Komisi dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025
Ketua Rapat	:	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	- Anggota 53 Orang Hadir, 5 Izin dari 8 Fraksi - Pimpinan Komisi I s.d Komisi XIII

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I s.d Komisi XIII dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.34 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Pimpinan Komisi-Komisi untuk

menyampaikan usulan RUU dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

II. KESIMPULAN.

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Komisi I s.d Komisi XIII dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 menyetujui/menyepakati RUU dari Komisi menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas yaitu sebagai berikut:

1. Komisi I: RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang Perubahan atas UU TNI
2. Komisi II: RUU tentang Perubahan atas UU ASN dan 122 RUU Kab/Kota
3. Komisi III: RUU tentang Hukum Acara Pidana
4. Komisi IV: RUU tentang Pangan, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan RUU tentang Kehutanan
5. Komisi V: RUU tentang Perubahan atas UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Komisi VI: RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perlindungan Konsumen, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU tentang BUMN
7. Komisi VII: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia.
8. Komisi VIII: RUU tentang Perubahan atas pengelolaan zakat, RUU tentang Bank Makanan, RUU tentang Perubahan atas UIndang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan haji, Dibahas secara paralel karena perkembangan system yang ada dan mou antara pemerintah RI dengan Arab Saudi, dan RUU tentang Penanggulangan bencana
9. Komisi IX: RUU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004, RUU tentang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, RUU tentang BPJS Nomor 24 Tahun 2011, RUU tentang PPHI Nomor 2 Tahun 2004, RUU tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, RUU tentang PPRT, RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran, dan RUU tentang Ketenagakerjaan.
10. Komisi X: RUU tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, RUU tentang Perguruan Tinggi, RUU tentang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, RUU tentang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009, RUU tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, RUU tentang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010, RUU tentang Pendidikan dan Layanan Kedokteran Hewan, RUU

tentang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, RUU tentang Permuseuman, RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dan RUU tentang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009

11. Komisi XI: RUU Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa, RUU tentang Penghapusan Piutang Negara, dan RUU tentang tentang Ekonomi Syariah.
12. Komisi XII: RUU tentang Energi, RUU tentang Geologi, RUU tentang Keanekaragaman Hayati, RUU tentang Perubahan Iklim, RUU tentang Pengelolaan Sampah, RUU tentang EBET, RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, RUU tentang Ketenagalistrikan.
13. Komisi XIII: RUU tentang Profesi Kurator, RUU tentang Advokat, RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, RUU tentang BPIP, RUU tentang HAM, dan RUU tentang PSK.

III. PENUTUP.

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I s.d Komisi XIII dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, ditutup pukul 14.50 WIB.

Jakarta, 12 November 2024
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI

WIDIHARTO, S.H., M.H